

Analisis Univariat Keterlibatan Masyarakat dalam Penataan Ruang di Desa Upon Batu, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah

Daniel Partawijaya^{*1}, Indrawan Permana², Herwin Sutrisno³, Singgih Hartanto⁴,
Theresia Susi⁵, Petrisly Perkasa⁶

^{1,2,3,4,5}Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia

⁶Pendidikan Teknik Bangunan, Universitas Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia
Email: ¹danielpartawijayampwk@gmail.com, ²indrakamis@gmail.com,

³herwin.sutrisno@arch.upr.ac.id, ⁴singgih.hartanto0502@gmail.com, ⁵theresia.susi@arch.upr.ac.id,
⁶petris.perkasa@ptb.upr.ac.id

Abstrak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu desa berwenang menyusun peraturan desa baik mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa, pungutan, tata ruang, maupun organisasi. Kendala yang muncul dalam pengembangan kawasan pedesaan yang diantaranya dapat menghambat pembangunan kawasan pedesaan adalah berupa konflik keruangan dan kepentingan yang dapat merugikan desa, terbatasnya sumber daya manusia, hingga terjadi penurunan kualitas dan kerusakan lingkungan hidup. Permasalahan pada penelitian ini adalah kurangnya kesadaran perangkat desa dan masyarakat akan pentingnya penataan ruang dalam pengembangan desa. Penelitian ini bertujuan membahas partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana tata ruang desa Upon Batu, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Pendekatan yang digunakan adalah metode campuran kuantitatif dan kualitatif, dimana peneliti mengumpulkan dan menganalisis data, mengintegrasikan temuan, dan menarik kesimpulan dengan menggunakan dua pendekatan. Pada penelitian ini, data yang diperoleh dari kuesioner yang berupa data numerik akan didukung dengan data kualitatif yang diperoleh dari wawancara mendalam. Analisis data dilakukan secara bertahap yaitu dengan analisis univariat dengan menggunakan program komputer SPSS 26. Metode partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Rencana Tata Ruang Desa Upon Batu yang telah dilaksanakan, merupakan inisiatif dari Pemerintah Daerah untuk menjalankan visi dan misi pembangunan, masyarakat telah berpartisipasi dalam penyusunan ini dengan hadir dan memberikan saran, walaupun masih banyak yang hadir sebagai pendengar. Terbatasnya pengetahuan, pendidikan dan penghasilan yang dimiliki oleh masyarakat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat dan bentuk partisipasi.

Kata kunci: *Gotong Royong, Perencanaan Pembangunan, Partisipasi Masyarakat*

Abstract

According to Law Number 6 of 2014, a village is a legally recognized community with defined limits that has the power to govern and administer public affairs, as well as protect the interests of its local residents based on community initiatives, inherent rights, and/or traditional legal rights. The governmental framework holds them in high regard. The Republic of Indonesia is a unitary state. Thus, villages have the power to create local ordinances pertaining to village finances, taxes, urban planning, and administration. Obstacles to rural development may include spatial and interest conflicts that threaten the village's stability, as well as a shortage of human resources that can lead to a decline in quality and environmental degradation. This research primarily addresses the lack of awareness among village officials and the community about the importance of spatial planning in village development. The aim of this study is to examine the community's involvement in the preparation of the spatial plan for Upon Batu village, located in Gunung Mas Regency, Central Kalimantan Province. The methodology employed is a combination of quantitative and qualitative techniques, wherein researchers gather and scrutinize data, merge the results, and derive conclusions in two distinct ways. This study will supplement the quantitative data collected through the questionnaire with qualitative data gathered from in-depth interviews. The data

analysis was conducted in a step-by-step manner, specifically through univariate analysis utilizing the SPSS 26 software program. The community participation method employed during the preparation of the Upon Batu Village Spatial Plan was an initiative of the regional government to fulfill the development vision and mission. The community took part in the process by attending and offering suggestions, although a significant number of individuals remained passive listeners. Factors such as limited knowledge, education, and community income have a significant impact on the extent and kind of engagement.

Keywords: *Community Involvement, Cooperation, Development Planning*

1. PENDAHULUAN

Untuk menjamin manfaat pembangunan desa dalam jangka panjang, perlu dilakukan inisiatif pembangunan yang mempertimbangkan permasalahan ekonomi, sosial, budaya, dan ekologi secara menyeluruh. Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi yang belum menyelesaikan rencana tata ruangnya, salah satu penyebabnya adalah belum adanya keterpaduan tata ruang antara penataan ruang kehutanan dan tata ruang tingkat provinsi Kalimantan Tengah (Atmanto et al., 2015). Oleh karena itu, perlu dilaksanakan upaya penataan ruang pada satuan wilayah desa guna mengawasi pertumbuhan desa (Pratiwi, 2018). Penataan ruang berfungsi sebagai alat untuk mengatasi dan mengakomodasi berbagai kepentingan tata ruang di wilayah desa (Marlina, 2016). UU No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang mewajibkan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk menyusun rencana tata ruang. Kurangnya keselarasan antara rencana tata ruang kehutanan dengan rencana tata ruangnya sendiri menyebabkan terdapat 282 unit korporasi kelapa sawit dan 3,9 juta hektar hutan yang dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa sawit tanpa prosedur yang baik sehingga menimbulkan konflik pemanfaatan ruang. Solusi permasalahan hutan tanaman sawit Provinsi Kalimantan Tengah adalah dengan melakukan revisi kebijakan mengenai konversi hutan PP nomor 60 tahun 2012, maka perkebunan kelapa sawit yang berada dalam kawasan hutan namun berada pada APL atau kawasan budidaya sesuai RTRWP Provinsi Kalimantan Tengah dapat memproses perizinannya (Setiawan et al., 2017).

Desa merupakan unit masyarakat yang paling mendasar dan terdekat dalam suatu negara. Desa mempunyai kewenangan untuk menetapkan peraturan dan perundang-undangan, yang memungkinkan mereka mengatur dan mengawasi urusan komunitas lokal sesuai dengan tradisi dan prinsip adat yang diakui (Harefa et al., 2023). Penataan ruang merupakan instrumen penting bagi pemerintah daerah, oleh karena itu persetujuan penataan ruang harus mendapat persetujuan dari lembaga legislatif yang berfungsi sebagai representasi masyarakat (Zamzani et al., 2022). Rencana tata ruang yang sah mempunyai kewenangan wajib, yang memerlukan kepatuhan baik dari masyarakat maupun pemerintah, dengan tujuan menjamin konsistensi pelaksanaan pemanfaatan ruang (Rismanita & Pradana, 2022). Hal tersebut berkaitan erat dengan penataan ruang, sehingga dengan adanya penataan ruang, dapat mewujudkan ruang yang nyaman, aman dan teratur. Kolaborasi antar instansi terkait dan diperlukan adanya evaluasi berkelanjutan dari sisi ekonomi, sosial dan setiap kebijakan yang dilaksanakan (Maulana, 2016).

Keterlibatan masyarakat dalam penataan ruang tingkat desa merupakan strategi kemitraan kolaboratif yang saling mengisi dan bergotong royong untuk tujuan yang sama (Roussos, 2000). Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang perlu diimplementasikan untuk membentuk kesadaran diri dari tentang potensi desa untuk mensejahterakan masyarakat sekitar (Juned et al., 2015). Pentingnya pembangunan desa sangatlah penting karena merupakan komponen integral dari pembangunan daerah dan nasional. Dalam kerangka pemerintahan, desa menempati peringkat terbawah, namun posisinya berada di garis depan dan langsung menjadi inti masyarakat (Badu & Ampugo, 2020). Oleh karena itu, dapat dijamin bahwa setiap inisiatif pembangunan yang dilakukan pemerintah, apa pun bentuknya, akan selalu berdampak pada kemajuan daerah pedesaan (Asariansyah, 2013).

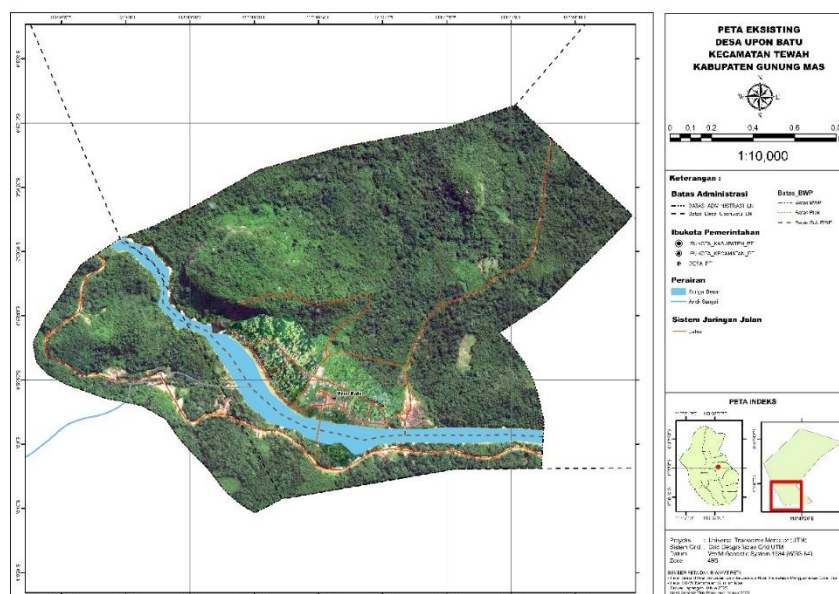
Partisipasi masyarakat mengacu pada keterlibatan individu yang proaktif dan mandiri dalam bekerja sama demi keuntungan bersama, yang merupakan ciri khas masyarakat Indonesia (Sari, 2021). Inisiatif mengacu pada tekad dan dorongan untuk melakukan tindakan, mengutamakan kemauan seseorang di atas keinginan belaka. Di sisi lain, swadaya dan gotong royong melibatkan kemampuan dan rasa keterhubungan antar individu, sehingga memerlukan pengorganisasian yang baik (Wahyuni, 2019). Selanjutnya tujuan dari penelitian ini dapat memberikan gambaran tingkat partisipasi desa Upon

Batu dengan tindak lanjutnya kedepannya masyarakat dapat saling bekerja sama membangun desa dengan mengadakan pertemuan rutin terkait penataan kawasan menuju desa wisata yang berkelanjutan dan keterlibatan masyarakat tidak lagi hanya bergantung pada tindakan pemerintah, namun didorong oleh masyarakat itu sendiri (Muslihah & Siregar, 2019). Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penataan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang, perlu dilakukan peningkatan pembinaan kepada masyarakat melalui upaya penyuluhan dan sosialisasi (Avessina et al., 2018). Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis bentuk keterlibatan masyarakat dalam penataan ruang di desa Upon Batu Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Keterlibatan masyarakat apakah memiliki keinginan dan kemampuan untuk melakukan perubahan dan saling bekerjasama dalam pengelolaan ruang untuk menuju desa wisata yang berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan adalah metode campuran kuantitatif dan kualitatif, dimana peneliti mengumpulkan dan menganalisis data, mengintegrasikan temuan, dan menarik kesimpulan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam satu studi. Pada penelitian ini, data yang diperoleh dari kuesioner yang berupa data numerik akan didukung dengan data kualitatif yang diperoleh dari *Indepth Interview* (Moleong, 2012).

Penelitian dilaksanakan di desa Upon Batu berada di Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas berjarak +/- 200,8 km dari Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah (Palangka Raya), dari Ibukota Kabupaten (Kuala Kurun) 43,6 km dan dari Ibukota Kecamatan (Tewah) 13,5 km, dengan lama perjalanan dari Kota Palangka Raya dapat ditempuh selama 4 jam 45 menit. Peta lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Peta desa Upon Batu, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah

Analisis univariat melibatkan pemeriksaan dan evaluasi setiap variabel individu dalam data penelitian. Analisis univariat adalah proses yang memadatkan sekumpulan data pengukuran menjadi informasi yang bermakna. Rangkumannya dapat disajikan dalam bentuk ukuran statistik, tabel, dan grafik. Variabel dianalisis secara individual dengan menggunakan analisis univariat.

Analisis data dilakukan secara bertahap yaitu dengan analisis univariat dengan menggunakan program komputer SPSS 26. Analisis univariat dilakukan untuk mendeskripsikan data-data yang telah dikumpulkan menggunakan tabel distribusi frekuensi (Djafar & Lellu, 2021). 1. Penelitian ini membahas partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana tata ruang desa upon batu dan tidak membahas pada partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang desa upon batu.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Beberapa temuan penelitian dijabarkan antara lain: (a) Faktor internal tingkat partisipasi masyarakat desa Upon Batu adalah karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, karakteristik responden berdasarkan usia, karakteristik responden berdasarkan pendidikan, karakteristik responden berdasarkan jenis pekerjaan dan karakteristik responden berdasarkan rata-rata penghasilan. (b) Faktor eksternal tingkat partisipasi masyarakat desa Upon Batu adalah pembinaan dan pemberian informasi pemerintah daerah kepada masyarakat, peranan pihak swasta dalam penyusunan rencana tata ruang desa upon batu, bentuk partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang desa Upon Batu dan tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang desa Upon Batu.

3.1. Faktor Internal

Berdasarkan distribusi frekuensi pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa sampel dalam penelitian ini mayoritas Perempuan (72%), karena perempuan di desa Upon Batu cenderung memiliki lebih banyak waktu luang untuk dapat menghadiri undangan *Focus Group Discussion* (FGD) dibandingkan laki-laki. Hal ini disebabkan pada saat FGD dilakukan, masyarakat dengan jenis kelamin laki-laki rata-rata sedang pergi bekerja.

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-Laki	14	28.0	28.0	28.0
	Perempuan	36	72.0	72.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Sumber: Data Primer, 2024

Berdasarkan distribusi frekuensi pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa dari 50 orang responden, mayoritas berusia 31-50 tahun (62%), sedangkan yang paling sedikit pada usia ≤ 30 tahun (14%). Hal ini terjadi karena masyarakat desa Upon Batu yang berusia ≤ 30 tahun banyak memilih tinggal di luar desa karena dalam masa pendidikan maupun sedang bekerja.

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	≤ 30 Tahun	7	14.0	14.0	14.0
	31-50 Tahun	31	62.0	62.0	76.0
	>50 Tahun	12	24.0	24.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Sumber: Data Primer, 2024

Berdasarkan distribusi frekuensi pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa mayoritas responden memiliki pendidikan sampai tingkat SMA (66%). Hal ini disebabkan oleh terbatasnya biaya masyarakat Desa Upon Batu untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, serta disebabkan kurangnya kesadaran dari masyarakat desa akan pentingnya pendidikan.

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SD - SMP	12	24.0	24.0	24.0
	SMA	33	66.0	66.0	90.0
	Diploma Sarjana	5	10.0	10.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Sumber: Data Primer, 2024

Berdasarkan distribusi frekuensi pada Tabel 4 dapat dilihat bahwa mayoritas responden memiliki pekerjaan sebagai petani (52%). Hal ini disebabkan oleh kurangnya pendidikan masyarakat desa Upon

Batu, sehingga masyarakat memilih pekerjaan sebagai petani (ladang), disamping itu masyarakat desa memiliki banyak lahan yang dapat digunakan untuk berladang.

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	PNS/TNI/POLRI	3	6.0	6.0	6.0
	Pensiunan	1	2.0	2.0	8.0
	Petani	26	52.0	52.0	60.0
	Wiraswasta	6	12.0	12.0	72.0
	Lainnya	14	28.0	28.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Sumber: Data Primer, 2024

Data jenis pekerjaan pada Tabel 4 diatas kemudian dibagi dalam klasifikasi pekerjaan formal dan non formal untuk kepentingan analisis data dalam uji statistik. Masyarakat digolongkan memiliki pekerjaan formal apabila usaha yang dilakukan mendapatkan berbagai proteksi ekonomi dari pemerintah, sedangkan pekerjaan non formal apabila usaha tidak memperoleh proteksi dari pemerintah dan belum menggunakan bantuan atau fasilitas pemerintah meskipun bantuan itu telah tersedia. Berikut adalah klasifikasi pekerjaan responden yang dianalisis berdasarkan distribusi frekuensi pada Tabel 5.

Tabel 5. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Klasifikasi Pekerjaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Formal	11	22.0	22.0	22.0
	Non Formal	39	78.0	78.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Sumber: Data Primer, 2024

Berdasarkan Tabel 5, dapat dilihat bahwa mayoritas responden memiliki pekerjaan dalam klasifikasi Non Formal sebesar 78%. Berdasarkan distribusi frekuensi pada Tabel 6 dapat dilihat bahwa mayoritas responden memiliki rata-rata penghasilan dibawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMR) yakni (76%). Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No 188.44/552/2023 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2023, UMR Kabupaten Gunung Mas ditetapkan sebesar Rp. 3.328.175,-. Sedangkan rata-rata penghasilan masyarakat sebesar Rp. 1.100.000,- s/d Rp. 1.400.000,- hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat hanya sebagai petani skala kecil yang hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari dan hanya sebagian kecil yang dapat dijual kembali.

Tabel 6. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Rata-Rata Penghasilan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<UMR	38	76.0	76.0	76.0
	≥UMR	12	24.0	24.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Sumber: Data Primer, 2024

3.2. Faktor Eksternal

Berdasarkan distribusi frekuensi pada Tabel 7 dapat dilihat bahwa mayoritas responden menjawab bahwa pembinaan dan pemberian informasi dari pemerintah daerah kepada masyarakat tinggi (74%). Hal ini karena seringkali pemerintah daerah melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya rencana tata ruang desa sebagai upaya untuk menjaga kelestarian alam dan budaya yang ada di desa Upon Batu.

Tabel 7. Distribusi Frekuensi Tingkat Pembinaan dan Pemberian Informasi dari Pemerintah Daerah

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rendah	13	26.0	26.0	26.0
	Tinggi	37	74.0	74.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Sumber: Data Primer, 2024

Berdasarkan distribusi frekuensi pada Tabel 8 dapat dilihat bahwa mayoritas responden menjawab bahwa pihak swasta memiliki peranan dan keterlibatan yang tinggi (68%) dalam penyusunan rencana tata ruang desa. Hal ini dikarenakan dengan terlihatnya partisipasi dari pihak swasta dalam penyusunan rencana dan membangun sarana dan prasarana penunjang wisata pada zona penerima berdasarkan rencana tata ruang desa Upon Batu dari dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) pihak swasta disekitar desa.

Tabel 8. Distribusi Frekuensi Tingkat Peranan Pihak Swasta dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Desa Upon Batu

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rendah	16	32.0	32.0	32.0
	Tinggi	34	68.0	68.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Sumber: Data Primer, 2024

Berdasarkan distribusi frekuensi pada Tabel 9 dapat dilihat bahwa bentuk partisipasi masyarakat yang paling dominan adalah bentuk sumbangan masukan/saran/usul (52%), kemudian diikuti bentuk pendengar (30%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat yang terlibat dalam penyusunan rencana tata ruang desa Upon Batu memberikan kontribusi masukan, dan sebagian besar lainnya hanya sebagai pendengar saja. Setidaknya sudah ada kemauan dan kemampuan masyarakat yang terlibat untuk mengemukakan pendapatnya. Adanya kemauan untuk berpartisipasi berhubungan dengan motivasi untuk mengadakan perubahan, sedangkan adanya kemampuan berpartisipasi berhubungan dengan sumber daya manusia dan kemampuan belajar.

Tabel 9. Distribusi Frekuensi Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Desa Upon Batu

	Bentuk Partisipasi	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Pendengar	15	30.0	30.0	30.0
	Sumbangan	26	52.0	52.0	82.0
	Masukan/Saran/Usul	7	14.0	14.0	96.0
	Sumbangan Informasi Data	1	2.0	2.0	98.0
	Bantuan Memperjelas hak atas ruang	1	2.0	2.0	100.0
	Bentuk Lain	1	2.0	2.0	
	Total	50	100.0	100.0	

Sumber: Data Primer, 2024

Dengan adanya masukan dari masyarakat berarti ada kemauan untuk memenuhi hak serta mengembangkan potensi dalam berpartisipasi. Data bentuk partisipasi masyarakat pada Tabel 9 diatas, kemudian dibagi dalam klasifikasi bentuk partisipasi aktif dan bentuk partisipasi pasif untuk kepentingan analisis data dalam uji statistik sebagai berikut. Berikut adalah distribusi frekuensi klasifikasi bentuk partisipasi masyarakat yang dianalisis berdasarkan distribusi frekuensi pada Tabel 10.

Tabel 10. Distribusi Frekuensi Klasifikasi Bentuk Partisipasi Masyarakat

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Pasif	17	34.0	34.0	34.0
	Aktif	33	66.0	66.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Sumber: Data Primer, 2024

Berdasarkan Tabel 10 dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden memiliki bentuk partisipasi Aktif yaitu (66%). Berdasarkan distribusi frekuensi pada Tabel 11 dapat dilihat bahwa mayoritas responden memiliki tingkat partisipasi sedang (60%).

Tabel 11. Klasifikasi Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Desa Upon Batu

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rendah	10	20.0	20.0	20.0
	Sedang	30	60.0	60.0	80.0
	Tinggi	10	20.0	20.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Sumber: Data Primer, 2024

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa bentuk keterlibatan masyarakat dalam penataan ruang di desa Upon Batu sebagian besar adalah pihak yang memberikan masukan, komentar, dan rekomendasi, sedangkan sisanya masyarakat hanya mengamati tanpa memberikan kontribusi aktif. Individu yang terlibat cenderung memiliki keinginan dan kemampuan untuk mengartikulasikan sudut pandang mereka. Kecenderungan untuk terlibat berhubungan dengan dorongan untuk melakukan perubahan, sedangkan kapasitas individu yang terlibat berhubungan dengan ketersediaan sumber daya manusia dan keinginan untuk belajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Asariansyah, M. F. (2013). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Jalan (Studi Kasus Di Kecamatan Lawang Kabupaten Malang)*. download.garuda.kemdikbud.go.id.
- Atmanto, W. D., Danarto, S., & Winarni, W. W. (2015). Pemberdayaan Karang Taruna untuk Kelola Potensi Pesisir Desa Bulakbaru Kabupaten Jepara. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement)*, 1(1), 24. <https://doi.org/10.22146/jpkm.16927>
- Avessina, M. J., Kustari, S. A., & Anisa, Z. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Komunikasi Penyuluhan. *Abdi Dosen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 2(3). <https://doi.org/10.32832/abdidos.v2i3.189>
- Badu, M., & Ampugo, J. M. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Kolaka Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara. In *Jurnal Ilmiah* download.garuda.kemdikbud.go.id. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1686090&val=18334&title=Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Kolaka Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1686090&val=18334&title=Partisipasi%20Masyarakat%20dalam%20Pembangunan%20di%20Desa%20Kolaka%20Kecamatan%20Mori%20Atas%20Kabupaten%20Morowali%20Utara)
- Djafar, T., & Lellu, A. (2021). Persepsi Pasien BPJS Tentang Mutu Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan. *Jurnal Kebidanan Dan Keperawatan Aisyiyah*, 16(2), 167–176. <https://doi.org/10.31101/jkk.927>
- Harefa, M. S., Rahmadi, M. T., Lubis, D. P., & ... (2023). Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Bulu Hadek Dalam Implementasi Tata Ruang Mangrove. *Jurnal Pendidikan* <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPG/article/view/67360>

- Juned, M., Kusumastuti, R. D., & Darmastuti, S. (2015). Penguatan peran pemuda dalam pencapaian tujuan ketiga Sustainable Development Goals (SDGs) di Karang Taruna Kelurahan Serua, Bojongsari, Depok. *Prosiding Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9, 1–7. <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/pkm/article/view/93>
- Marlina, S. (2016). Arahana Fungsi Kawasan Hutan yang Optimal dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palangka Raya melalui Pendekatan Analisis Spasial. *Media Ilmiah Teknik Lingkungan*, 1(1), 29–41. <https://doi.org/10.33084/mitl.v1i1.137>
- Maulana, K. k. (2016). Kesesuaian Lahan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Penataan Ruang di Sub Das Gunting Kabupaten Jombang. In *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota* (Vol. 11, Issue 2, p. 194). download.garuda.kemdikbud.go.id. <https://doi.org/10.14710/pwk.v11i2.10848>
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Muslihah, S., & Siregar, H. O. (2019). Dampak alokasi dana desa terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan* <https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JAEMB/article/view/1027>
- Pratiwi, L. P. K. (2018). Potensi Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan di Daerah Aliran Sungai Ayung (Studi Kasus Tukad Bindu, Desa Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur). In *SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian* (p. 75). <https://doi.org/10.24843/soca.2018.v12.i01.p06>
- Rismanita, E., & Pradana, G. W. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Jaya Tirta Desa Gedongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. *Publika*. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/44604>
- Roussos, S. T. (2000). A review of collaborative partnerships as a strategy for improving community health. In *Annual Review of Public Health* (Vol. 21, pp. 369–402). <https://doi.org/10.1146/annurev.publhealth.21.1.369>
- Sari, I. W. K. (2021). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Wisata Bukit Mingging Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo*. eprints.umpo.ac.id. <http://eprints.umpo.ac.id/8191/>
- Setiawan, E. N., Maryudi, A., Purwanto, R. H., & Lele, G. (2017). Konflik Tata Ruang Kehutanan Dengan Tata Ruang Wilayah (Studi Kasus Penggunaan Kawasan Hutan Tidak Prosedural Untuk Perkebunan Sawit Provinsi Kalimantan Tengah). *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 3(1), 51. <https://doi.org/10.31292/jb.v3i1.89>
- Wahyuni, D. (2019). Pengembangan desa wisata pentingsari, kabupaten sleman dalam perspektif partisipasi masyarakat. In *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah* download.garuda.kemdikbud.go.id. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1686288&val=18337&title=Pengembangan Desa Wisata Pentingsari Kabupaten Sleman dalam Perspektif Partisipasi Masyarakat](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1686288&val=18337&title=Pengembangan%20Desa%20Wisata%20Pentingsari%20Kabupaten%20Sleman%20dalam%20Perspektif%20Partisipasi%20Masyarakat)
- Zamzani, R., Mujiburohman, D. A., Salim, M. N., & Dewi, A. R. (2022). Kebijakan Penataan Ruang Dan Pemanfaatan Danau Tempe. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 9(2), 178–191. <https://doi.org/10.37606/publik.v9i2.294>